

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2015 merupakan pedoman dan arahan bagi masing-masing SKPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jambi 2010 - 2015. Renstra SKPD ini akan menjadi dasar dalam Penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2015 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen serta dukungan DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan perguruan tinggi, pihak swasta, LSM dan masyarakat.

GUBERNUR JAMBI,

H. HASAN BASRI AGUS

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Besarnya tantangan sebagai konsekuensi dari adanya era reformasi dan peningkatan persaingan di era globalisasi serta tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, ditambah kurangnya sumberdaya manusia yang memenuhi persyaratan kualitas, mendorong Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi mempersiapkan diri dan berupaya menangkap peluang-peluang baru.

Untuk tetap eksis dan unggul dalam suatu tahapan yang konsisten, konsekuen dan berkelanjutan, maka BLHD harus meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat yang dituangkan dalam "Visi".

Visi adalah suatu gambaran dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana suatu organisasi akan di bawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Dengan pengertian tersebut, maka visi BLHD Provinsi Jambi yang ingin dicapai yakni :

Mewujudkan BLHD Provinsi Jambi Yang Handal dan Proaktif Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Menuju JAMBI EMAS Tahun 2015

- Handal : Mengandung makna keadaan yang menggambarkan kemampuan BLHD Provinsi Jambi yang **sanggup** dan **dapat dipercaya** dalam melaksanakan pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menjaga pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang lebih baik dan lebih berkualitas.
- Proaktif : Mengandung makna akan **peran** BLHD Provinsi Jambi yang lebih nyata dan bertanggungjawab dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup
- Pelestarian fungsi lingkungan hidup : Mengandung arti rangkaian **upaya** untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

4.1.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan berhasil dengan optimal serta sesuai dengan visi yang diinginkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh aparatur BLHD dan pihak-pihak yang berkepentingan (*costumer dan stakeholders*) dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh di waktu-waktu mendatang.

Sesuai dengan fungsi dan visi yang ingin diwujudkan, maka misi BLHD Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mengembangkan kapasitas kelembagaan yang bertanggungjawab dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup
2. Melaksanakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang bersifat kooperatif dan berkesinambungan
3. Mewujudkan pengelolaan SDA yang berlandaskan prinsip-prinsip Konservasi, Rehabilitasi dan Pemulihan yang benar

4. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
5. Mengembangkan sistem informasi dan teknologi sebagai dasar pengelolaan lingkungan

4.2. Tujuan dan Sasaran

4.2.1. Tujuan

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, maka kedepan Tujuan yang ingin diwujudkan dalam perencanaan strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi periode 2011-2015 yaitu :

1. Meningkatkan kapabilitas institusi dan aparatur
2. Meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup
3. Meningkatkan koordinasi berkelanjutan lintas sektoral lingkungan hidup
4. Meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam agar menerapkan prinsip-prinsip konservasi, rehabilitasi dan pemulihan yang benar
5. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup
6. Meningkatkan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup

4.2.1. Sasaran

Dalam mewujudkan tujuan tersebut diatas, BLHD Provinsi Jambi menetapkan sasaran-sasaran yang akan dilaksanakan dalam bentuk :

1. Tercapainya peningkatan kapabilitas institusi dan aparatur
2. Terwujudnya peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup
3. Terlaksananya peningkatan kordinasi berkelanjutan lintas sektoral lingkungan hidup

4. Terwujudnya peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam agar menerapkan prinsip-prinsip konservasi, rehabilitasi dan pemulihan yang benar
5. Terwujudnya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup
6. Tercapainya peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup



B L H D



Tabel 4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi BLHD Provinsi Jambi : Mewujudkan BLHD Provinsi Jambi Yang Handal dan Proaktif Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Guna Mewujudkan Masyarakat Mandiri dan Lingkungan Hidup Lestari Tahun 2015			
No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mengembangkan kapasitas kelembagaan yang bertanggungjawab dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup	Meningkatkan kapabilitas institusi dan aparatur	Tercapainya peningkatan kapabilitas institusi dan aparatur
2	Melaksanakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang bersifat kooperatif dan berkesinambungan	a. Meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup b. Meningkatkan koordinasi berkelanjutan lintas sektoral lingkungan hidup	a. Terwujudnya peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup b. Terlaksananya peningkatan koordinasi berkelanjutan lintas sektoral lingkungan hidup
3	Mewujudkan pengelolaan SDA yang berlandaskan prinsip-prinsip Konservasi, Rehabilitasi dan Pemulihan yang benar	Meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam agar menerapkan prinsip-prinsip konservasi, rehabilitasi dan pemulihan yang benar	Terwujudnya peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam agar menerapkan prinsip-prinsip konservasi, rehabilitasi dan pemulihan yang benar

No	Misi	Tujuan	Sasaran
4	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup	Terwujudnya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup
5	Mengembangkan sistem informasi dan teknologi sebagai dasar pengelolaan lingkungan	Meningkatkan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Tercapainya peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup

B L H D



4.3. Strategi dan Kebijakan

4.3.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai Visi dan Misi BLHD Provinsi Jambi tersebut, maka kiranya perlu disusun strategi yang didalamnya memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan faktor penting dalam proses perencanaan. Strategi sebagai rencana menyeluruh dan terpadu dari kinerja BLHD Provinsi Jambi dalam mencapai tujuannya yang dalam RENSTRA ini diberikan batasan waktu pelaksanaan selama kurun waktu tahun 2010 - 2015, adapun strategi tersebut adalah:

1. Dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengedepankan peningkatan institusi dan aparatur
2. Pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup dilakukan melalui upaya penerapan aturan perundangan yang berlaku baik dalam kajian, pengawasan dan pemantauauan terhadap semua sumber pencemar yang bersifat buatan maupun alami
3. Pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengedepankan koordinasi berkelanjutan lintas sektoral
4. Menumbuhkembangkan kesadaran *stakeholder* terhadap pengelolaan sumber daya alam yang menerapkan prinsip-prinsip konservasi, rehabilitasi dan pemulihan yang benar
5. Menjadikan informasi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan lingkungan hidup

4.3.2. Arah Kebijakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan

pemerintah maupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran.

Prioritas pembangunan Provinsi Jambi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, telah ditetapkan sebanyak 5 (lima) Prioritas yaitu :

1. **Peningkatan infrastruktur wilayah dan Pelayanan umum.**
2. **Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta sosial budaya.**
3. **Pengembangan ekonomi rakyat, investasi dan kepariwisataan**
4. **Ketahanan pangan dan sumberdaya alam serta Lingkungan hidup**
5. **Penataan Tata Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender**

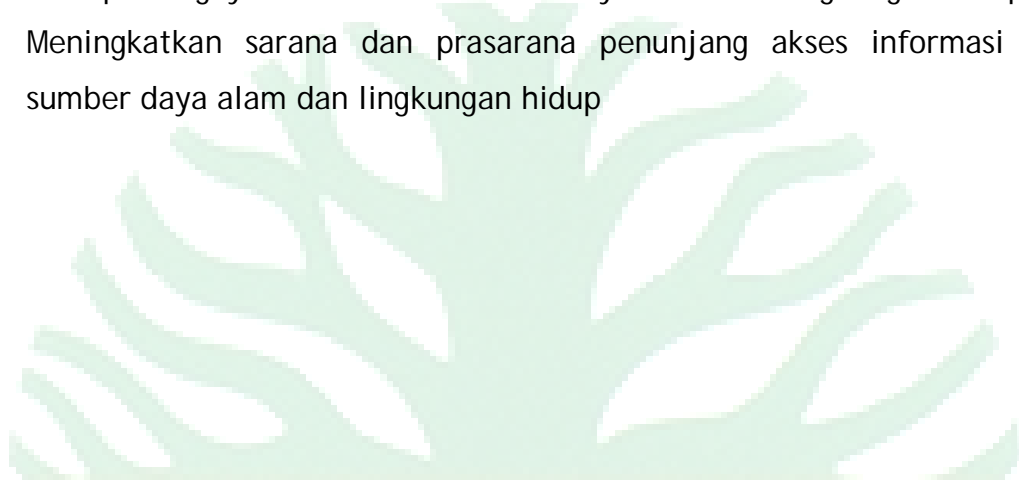
Memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jambi tersebut diatas terlihat bahwa pembangunan lingkungan hidup dititikberatkan pada prioritas 4 (empat) yaitu “ **Prioritas Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam serta Lingkungan Hidup** “ dengan focus :

- a) Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan
- b) Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Sumber Daya mineral, Air, Lahan dan energi yang dapat diperbarukan.
- c) Peningkatan kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup

Sinergi antara prioritas pembangunan Provinsi Jambi dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010-2015 dengan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi, selanjutnya diuraikan pada arah kebijakan yang dipakai dalam perencanaan strategis di Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapabilitas institusi dan aparatur pengelola lingkungan hidup baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota
2. Meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kajian, pengawasan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan

3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota
4. Meningkatkan pembinaan terhadap stakeholder dalam pengelolaan sumber daya alam agar menerapkan prinsip-prinsip konservasi, rehabilitasi dan pemulihan yang benar
5. Membangun dan membina komunikasi, serta sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup
6. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup



B L H D



Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2010-2015

Visi BLHD Provinsi Jambi : Menjadikan BLHD Provinsi Jambi Yang Handal dan Proaktif Dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Guna Mewujudkan Masyarakat Mandiri dan Lingkungan Hidup Lestari			
Misi I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mengembangkan kapasitas kelembagaan yang bertanggungjawab dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kapabilitas institusi dan aparatur	Tercapainya peningkatan kapabilitas institusi dan aparatur	Dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengedepankan peningkatan institusi dan aparatur	Meningkatkan kapabilitas institusi dan aparatur pengelola lingkungan hidup baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota
Misi II : Melaksanakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yang bersifat kooperatif dan berkesinambungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
a. Meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup	1. Terwujudnya peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup	Pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup dilakukan melalui upaya penerapan aturan perundangan yang berlaku baik dalam kajian, pengawasan dan pemantauuan terhadap semua sumber pencemar yang bersifat buatan maupun alami	Meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui kajian, pengawasan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan
b. Meningkatkan koordinasi berkelanjutan lintas sektoral lingkungan hidup	2. Terlaksananya peningkatan kordinasi berkelanjutan lintas sektoral lingkungan hidup	Pelaksanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengedepankan koordinasi berkelanjutan lintas sektoral	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota

Misi III : Mewujudkan pengelolaan SDA yang berlandaskan prinsip-prinsip Konservasi, Rehabilitasi dan Pemulihan yang benar			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam agar menerapkan prinsip-prinsip Konservasi, Rehabilitasi dan Pemulihan yang benar	Terwujudnya peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam agar menerapkan prinsip-prinsip konservasi, rehabilitasi dan pemulihan yang benar	Menumbuhkembangkan kesadaran <i>stakeholder</i> terhadap pengelolaan sumber daya alam yang menerapkan prinsip-prinsip konservasi, rehabilitasi dan pemulihan yang benar	Meningkatkan pembinaan terhadap <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan sumber daya alam agar menerapkan prinsip-prinsip konservasi, rehabilitasi dan pemulihan yang benar
Misi IV : Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara SDA dan lingkungan hidup	Terwujudnya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup	Menumbuhkembangkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup	Membangun dan membina komunikasi, serta sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup
Misi V : Mengembangkan sistem informasi dan teknologi sebagai dasar pengelolaan lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Tercapainya peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Menjadikan informasi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan lingkungan hidup	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup

Tabel 4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BLHD Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Sasaran				
				Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kapabilitas institusi dan aparatur	Tercapainya peningkatan kapabilitas institusi dan aparatur	Peningkatan kapabilitas institusi dan aparatur dalam pengelolaan lingkungan.	Outcome : Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan meningkatnya pengendalian dan perusakan lingkungan sebagai satu kesatuan dengan penataan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas SDA dan pemberdayaan masyarakat.	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatkan mutu pelaksanaan AMDAL dan dokumen AMDAL terhadap dunia usaha/ lembaga dalam pengelolaan LH melalui peningkatan koordinasi penyusunan AMDAL	Peningkatan kesadaran dunia usaha wajib AMDAL/UKL-UPL dalam pelaksanaan AMDAL serta terlaksanannya penilaian terhadap lembaga pengelola LH Kab/Kota yang memiliki lisensi	Output : 1. Terpantaunya kondisi areal dunia usaha/kegiatan 2. Terlaksananya Pembentukan Komisi AMDAL di Kab/ Kota 3. Terlaksananya Pembinaan Implementasi RKL/RPL perusahaan di Prov. Jambi 4. Terselenggaranya Rakornis AMDAI se Prov. Jambi	44	44	44	44	44
			Output :					

Meningkatkan sistem penataan hukum bidang lingkungan	Peningkatan sistem penataan hukum bidang lingkungan	Terfasilitasinya proses tindak lanjut beberapa kasus pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan	1. Terlaksananya Penanganan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan 2. Terlaksananya Koordinasi kegiatan dalam rangka penegakan hukum lingkungan 3. Terlaksananya Sosialisasi/publikasi peraturan dibidang LH 4. Terlaksananya peningkatan kapabilitas penataan hukum	11 3 2 -	11 3 2 -	11 3 2 40	11 3 2 40	11 3 2 40
Meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup	a. Terwujudnya peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup	Peningkatan upaya pelestarian dan kordinasi berkelanjutan lintas sektoral lingkungan hidup	Outcome : Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan meningkatnya pengendalian dan perusakan lingkungan sebagai satu kesatuan dengan penataan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas SDA dan pemberdayaan masyarakat.	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan koordinasi berkelanjutan lintas sektoral lingkungan hidup	b. Terlaksananya peningkatan koordinasi berkelanjutan lintas sektoral lingkungan hidup		Output :	-	-	-	-	-

Meningkatkan kualitas lingkungan	Peningkatan kualitas sumber daya air, udara dan tanah	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya air, udara dan tanah	1. Terpantaunya Kualitas air sungai lintas kab/kota	32	32	32	32	32
			2. Terpantaunya Kualitas udara ambient	44	44	44	44	44
			3. Terpantaunya Bahan Perusak Ozon	10	10	10	10	10
			Output :	-				
Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan bidang LH	Peningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan bidang LH	Terlaksananya pengawasan thd beberapa perusahaan industri dalam ketaatan pelaksanaan kebijakan bid LH	1. Terawasinya Pembuangan Limbah Cair	35	40	45	50	55
			2. Terawasinya Pembuangan Land Application	20	20	20	20	20
			3. Tergawasinya Pembuangan Limbah B3	35	40	45	50	55
			4. Terawasinya Pembuangan Emisi dari sumber tidak bergerak	35	40	45	50	55
Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengkajian akibat dampak lingkungan	Peningkatkan kualitas pelaksanaan pengkajian sungai di Provinsi Jambi akibat dampak lingkungan	Tersediannya hasil kajian peningkatan kualitas sungai di Provinsi Jambi akibat dampak lingkungan	Output :					
			1. Tersusunnya laporan pengkajian daya tampung sungai	1	1	1	1	1
Meningkatkan kinerja UPTB Laboratorium Lingkungan daerah	Peningkatkan kinerja UPTB Laboratorium Lingkungan daerah	Meningkatnya kualitas kinerja UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah di Provinsi Jambi	Output : 1 Tersediannya bahan kimia untuk pemeriksaan kualitas lingkungan	1	1	1	1	1

			2 Terlaksananya Kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium lingkungan	1	1	1	1	1
			3 Tersedianya peralatan pengujian air, udara dan tanah	1	1	1	1	1
			4 Terlaksananya Pengujian kualitas air, udara dan tanah	1200	1400	1500	1600	1700
			Outcome :	-	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam agar menerapkan prinsip-prinsip Konservasi, Rehabilitasi dan Pemulihan yang benar	Terwujudnya peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam agar menerapkan prinsip-prinsip konservasi, rehabilitasi dan pemulihan yang benar	Peningkatan perlindungan SDA dari kerusakan dan mengelola kawasan konservasi dan terkendalinya pengawasan pemanfaatan SDA	Meningkatnya kinerja pemerintah dalam rangka perlindungan SDA dari kerusakan dan mengelola kawasan konversi					
			Output:					
Meningkatkan pengendalian dan pengawasan SDA yang dikelola/dimanfaatkan oleh dunia usaha	Peningkatan pengendalian dan pengawasan SDA yang dikelola/dimanfaatkan oleh dunia usaha	Terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDA yang dikelola/ dimanfaatkan oleh dunia usaha di Prov. Jambi	Terawasnya perusahaan yang memanfaatkan dan mengelola SDA	10	10	10	10	10
			Outcome :	100%	100%	100%	100%	100%
			meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati melalui percepatan pemulihan dan perbaikan cadangan SDA					
			Output :					

Meningkatkan koordinasi antar Instansi Lintas Sektoral, perusahaan dan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan konservasi SDA dan penyuluhan lahan dan hutan	Meningkatkan kualitas kebijakan konservasi SDA dan kualitas penyuluhan lahan dan hutan sehingga terlestarinya keaneka ragaman hayati	Terlindungnya kelestarian keaneka ragaman hayati	1. Terlaksananya penilaian terhadap Pemkab atas pelaksanaan konservasi SDA dan pengendalian kerusakan lingkungan Menuju Indonesia Hijau (MIH)	10	10	10	10	10
			2. Terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi Kebakaran Hutan dan Lahan	40	40	40	40	40
Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara SDA dan lingkungan hidup	Terwujudnya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup	Outcome : Menurunnya beban pencemaran lingkungan dan meningkatnya pengendalian dan perusakan lingkungan sebagai satu kesatuan dengan penataan hukum lingkungan, peningkatan kapasitas SDA dan pemberdayaan masyarakat.	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha akan Batanghari Bersih dan meningkatnya kualitas air sungai Batanghari	Peningkatan Kepedulian Masyarakat dan pemangku kepentingan akan lingkungan hidup di Provinsi Jambi	Terwujudnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap kebersihan sungai Batanghari dan peningkatan kualitas air sungai Batanghari	Output : 1. Koordinasi pengelolaan Sungai Batanghari 2. Pemberdayaan Kelompok masyarakat peduli sungai Batanghari	- -	1 paket 56	- 56	- 56	- 56
			Output :					

Meningkatkan kualitas peran serta masyarakat akan pentingnya memelihara SDA dan LH	Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara SDA dan LH	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara SDA dan LH	1. Terlaksananya Penilaian Kota Bersih, Kalpataru, Adipura dan Adiwiyata	11	11	11	11	11
			2. Terlaksananya Lomba menggambar poster dan mengarang tentang LH	50	50	50	50	50
			3. Terlaksananya Peringatan Hari LH Se Dunia	1	1	1	1	1
			Output :					
			1. Terlaksananya bimtek tentang pengelolaan persampahan terhadap masyarakat	-	-	-	120	120
			Outcome :	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Tercapainya peningkatan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatkan jejaring koordinasi untuk mengembangkan data dan informasi tentang kondisi SDA dan pengelolaan lingkungan hidup	Terwujudnya peningkatan kualitas informasi bidang lingkungan hidup dan mengkoordinasikan lintas daerah/pusat dalam pengelolaan lingkungan hidup					
			Output :					
Meningkatkan kualitas data dan sistem Informasi pengelolaan LH	Meningkatnya kualitas data dan sistem Informasi pengelolaan LH	Tersediannya data dan sistem informasi pengelolaan lingkungan hidup untuk penyusunan kebijakan dan dapat diakses oleh berbagai pihak	1. Terlaksananya Aplikasi dan Up dating Website BLHD	-	-	-	10000	15000
			2. Tersusunnya SLHD Provinsi Jambi (update)	1	1	1	1	1
			3. Terlaksananya pameran lingkungan hidup	1	1	1	1	1
			4. Terlaksananya Operasional Mobil Hijau	5	5	5	5	5



			5. Tersebar nya Informasi LH melalui leaflet, media cetak/ elektronik	6	6	6	6	6
			Output :					
Meningkatkan pelayanan SKPD	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan SKPD	Terlaksananya pelayanan optimal dari SKPD	1. Terlaksananya program dan kegiatan SKPD	1	1	1	1	1

B L H D















Tujuan	
1	
Mewujudkan LH yang berkualitas dan mewujudkan regulasi tentang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan sehingga masyarakat memperoleh kualitas LH yang bersih dan sehat.	Mengeksekusi peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan. Meningkatkan mutu pelayanan publik dan meningkatkan mutu kinerja aparatur sipil negara.
Meningkatkan penataan hukum dibidang lingkungan	Terwujudnya hukum lingkungan yang baik dan adil.
Meningkatkan kualitas lingkungan	Peningkatan sumber daya manusia dan tenaga ahli.



1	
Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan bidang LH	Peningkatan terhadap bidang
Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengkajian akibat dampak lingkungan	Peningkatan pelaksanaan sungai akibat



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha akan Batanghari Bersih dan meningkatnya kualitas air sungai Batanghari	Peningkatan Kepedulian Masyarakat dan pemangku kepentingan akan lingkungan hidup di Provinsi Jambi	Terwujudnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap kebersihan sungai Batanghari dan peningkatan kualitas air sungai Batanghari	Output : 1. Inventarisasi sumber pencemar dan jumlah KK yang menggunakan jamban disepanjang sungai Batanghari 2. Pendataan KK yang ikut kegiatan Prokasih 3. Penandatanganan superkasih 4. Sosialisasi kegiatan Prokasih pada masyarakat di sekitar sungai Batanghari 5. Pemandahan MCK disepanjang sungai Batanghari 6. Pembangunan WC untuk masyarakat yang terkena pemindahan MCK 7. Pembuatan sumur 8. Pengadaan Bak Sampah	- - - - - - -	5 Kab/Kota 500 KK 12 perusahaan 5 kali 50 Unit 500 KK 100 unit 50 unit	- 500 KK 10 perusahaan 5 kali 75 Unit 500 KK 100 unit 50 unit	- 500 KK 10 perusahaan 5 kali 75 Unit 500 KK 100 unit 50 unit	- 500 KK 10 perusahaan 5 kali 75 Unit 500 KK 100 unit 50 unit



			9. Pemberdayaan Kelompok masyarakat peduli sungai Batanghari	-	56 kel./ 10 kali	56 kel./ 10 kali	56 kel./ 10 kali	56 kel./ 10 kali
--	--	--	--	---	------------------	------------------	------------------	------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan ketaatan perusahaan/dunia usaha terhadap pengelolaan LH	Meningkatnya ketaatan perusahaan/dunia usaha terhadap pengelolaan LH	Terwujudnya peningkatan ketaatan perusahaan/dunia usaha di Prov Jambi terhadap pengelolaan LH	Output : 1. Penilaian peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) 2. Tersusunnya Laporan SLHD 3. Penghitungan daya tampung dan daya dukung lahan	40 perusahaan 10 buku 1 paket	-	45 perusahaan	50 perusahaan	55 perusahaan
Meningkatkan mutu pelaksanaan AMDAL dan dokumen AMDAL	Meningkatkan mutu pelaksanaan AMDAL dan dokumen AMDAL terhadap dunia usaha/ lembaga dalam pengelolaan LH melalui peningkatan koordinasi penyusunan AMDAL	Peningkatan kesadaran dunia usaha wajib AMDAL/UKL-UPL dalam pelaksanaan AMDAL serta terlaksananya penilaian terhadap lembaga pengelola LH Kab/Kota yang memiliki lisensi Komisi Penilaian AMDAL	Output : 1. Pemantauan kondisi areal dunia usaha/kegiatan 2. Penilaian Dokumen AMDAL 3. Penilaian Komisi AMDAL 4. Pembinaan Implementasi RKL/RPL perusahaan di Prov. Jambi 5. Rakornis AMDAL se Prov. Jambi Output :	11 kab/Kota 10 dokumen 2 Kab 30 perusahaan 1 kali	11 kab/Kota 10 dokumen 2 Kab 30 perusahaan 1 kali	11 kab/Kota 12 dokumen 2 Kab 35 perusahaan 1 kali	11 kab/Kota 14 dokumen 2 Kab 40 perusahaan 1 kali	11 kab/Kota 15 dokumen 2 Kab 45 perusahaan 1 kali



Meningkatkan kualitas peran serta masyarakat akan pentingnya memelihara SDA dan LH	Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara SDA dan LH	Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara SDA dan LH	1. Penilaian Kota Bersih, Kalpataru, Adipura dan Adiwiyata	11 kab/Kota	11 kab/Kota	11 kab/Kota	11 kab/Kota	11 kab/Kota
			2. Lomba menggambar poster dan mengarang tentang LH	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3. Peringatan Hari LH Se Dunia	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
			4. Pembinaan Sekolah yang berwawasan Lingkungan	-	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota
			5. Study Banding Program Adiwiyata	1 kali	-	-	-	-
			Output :					
Meningkatkan kinerja UPTB Laboratorium Lingkungan daerah	Peningkatkan kinerja UPTB Laboratorium Lingkungan daerah	Meningkatnya kualitas kinerja UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah di Provinsi Jambi	1. Penyediaan bahan kimia untuk pemeriksaan kualitas lingkungan	14 item	25 item	25 item	25 item	25 item
			2. Kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium lingkungan	22 item	25 item	25 item	30 item	30 item
			3. Penyediaan peralatan pengujian air, udara dan tanah	21 item	25 item	25 item	25 item	25 item
			4. Surveilan /akreditasi	5 unit	8 unit	10 unit	12 unit	15 unit
			Output :					
Meningkatkan sistem	Peningkatan sistem	Terfasilitasinya proses	1. Penanganan kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	10 kasus	15 kasus



penaatan hukum bidang lingkungan	penaatan hukum bidang lingkungan	tindak lanjut beberapa kasus pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan serta terwujudnya peningkatan sistem penataan hukum dibidang lingkungan	<p>2. Koordinasi kegiatan dalam rangka penegakan hukum lingkungan</p> <p>3. Sosialisasi peraturan dibidang LH</p>	11 kab/ kota	11 kab/ kota	11 kab/ kota	11 kab/ kota	11 kab/ kota
				3 media	3 media	3 media	3 media	3 media
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4. Operasional pemberantasan PETI	3 kali	-	-	-	-
			Outcome :	-	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan SDA dari kerusakan dan mengelola kawasan konservasi yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik	Meningkatkan perlindungan SDA dari kerusakan dan mengelola kawasan konservasi	Terwujudnya peningkatan perlindungan SDA dari kerusakan dan mengelola kawasan konservasi dan terkendalinya pengawasan pemanfaatan SDA	Meningkatnya kinerja pemerintah dalam rangka perlindungan SDA dari kerusakan dan mengelola kawasan konversi					
Meningkatkan pengendalian dan pengawasan SDA yang dikelola/dimanfaatkan oleh dunia usaha	Peningkatan pengendalian dan pengawasan SDA yang dikelola/dimanfaatkan oleh dunia usaha	Terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDA yang dikelola/ dimanfaatkan oleh dunia usaha di Prov. Jambi	Output :					
			1. Pengawasan pemanfaatan SDA Minyak dan Gas	-	-	6 perusahaan	6 perusahaan	7 perusahaan
			2. Pengawasan pemanfaatan SDA Batubata	-	5 perusahaan	6 perusahaan	6 perusahaan	7 perusahaan
			3. Pengawasan pemanfaatan SDA Hutan	-	-	3 perusahaan	3 perusahaan	3 perusahaan
			4. Pengawasan pemanfaatan SDA Galian C	-	-	10 perusahaan	15 perusahaan	15 perusahaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Merehabilitasi alam yang telah rusak dan mempercepat pemulihan cadangan SDA sehingga selain berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan	Mengukur tingkat kerusakan lingkungan dalam upaya pemulihan dan perbaikan cadangan SDA	Tersedianya data kerusakan lingkungan sebagai dasar rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Outcome : meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati melalui percepatan pemulihan dan perbaikan cadangan SDA	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan koordinasi antar Instansi Lintas Sektoral, perusahaan dan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan konservasi SDA dan penyuluhan lahan dan hutan	Meningkatkan kualitas kebijakan konservasi SDA dan kualitas penyuluhan lahan dan hutan sehingga terlestarinya keaneka ragaman hayati	Terlindungnya kelestarian keaneka ragaman hayati	Output : 1. Penilaian terhadap Pemkab atas pelaksanaan konservasi SDA dan pengendalian kerusakan lingkungan Menuju Indonesia Hijau (MIH) 2. Koordinasi dan Sosialisasi Kebakaran Hutan dan Lahan	11 kab/ kota 11 kab/ kota	11 kab/ kota 11 kab/ kota	11 kab/ kota 11 kab/ kota	11 kab/ kota 11 kab/ kota	11 kab/ kota 11 kab/ kota
Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara	Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat akan pentingnya	Meningkatkan jejaring koordinasi untuk mengembangkan data dan	Outcome : Terwujudnya peningkatan kualitas informasi bidang lingkungan hidup dan	100%	100%	100%	100%	100%

sumber daya alam dan lingkungan hidup yang sehat.	memelihara sumber daya alam dan LH yang sehat	informasi tentang kondisi SDA dan pengelolaan lingkungan hidup	mengkoordinasikan lintas daerah/pusat dalam pengelolaan lingkungan hidup					
---	---	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi LH	Terwujudnya Peningkatan kualitas dan akses informasi kepada masyarakat dalam mendukung pengelolaan SDA dan LH							
Meningkatkan kualitas data dan sistem Informasi pengelolaan LH	Meningkatnya kualitas data dan sistem Informasi pengelolaan LH	Tersedianya data dan sistem informasi pengelolaan lingkungan hidup untuk penyusunan kebijakan dan dapat diakses oleh berbagai pihak	<p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi dan Up dating Webside BLHD 2. Penyusunan SLHD Provinsi Jambi 3. Penilaian SLHD Kab/Kota se Provinsi Jambi 4. Ekspose keberhasilan lingkungan hidup 5. Operasional Mobil Hijau 6. Penyebaran Informasi LH melalui leaflet, media cetak/ elektronik 	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
				-	10 buku	10 buku	10 buku	10 buku
					1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
					2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
					1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun
				1000 lbr 2 kali	1000 lbr 3 kali	1000 lbr 3 kali	1000 lbr 3 kali	1000 lbr 3 kali



BAB I - PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi untuk Tahun 2010 - 2015 merupakan dokumen perencanaan daerah bidang lingkungan hidup yang berisikan penjabaran Visi, Misi dan Program yang akan dicapai untuk masa kerja 5 (lima) tahun mendatang.

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 5 (lima) tahun tersebut, SKPD berkewajiban untuk bertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Untuk itu prinsip perencanaanyapun dilandasi dan dibatasi oleh kewenangan yang dimiliki lembaga ini sebagai lembaga teknis daerah bidang lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

Disamping itu Renstra ini juga menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Renja SKPD, dasar penilaian kinerja Kepala SKPD dan menjadi acuan penyusunan LAKIP SKPD. Renstra SKPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Provinsi Jambi khususnya di bidang lingkungan hidup.

Dokumen Renstra ini bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakan pada jangkauan jangka panjang dan mengacu pada Visi



dan Misi Pembangunan Provinsi Jambi, maka rumusan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi untuk 5 tahun mendatang dapat bersinergis dengan arah pembangunan Provinsi Jambi untuk Tahun 2010 - 2015.

Dalam pelaksanaannya, Renstra ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan dari pada masyarakat, stake holder yang terkait dengan lingkungan hidup serta pihak eksekutif dan legislatif baik dalam bentuk fasilitasi kebijakan maupun pendanaan dalam upaya-upaya pengendalian lingkungan hidup khususnya aspek yang sangat erat kaitannya dengan implemtasi program dan kegiatan yang menjadi wewenang Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi.

Adapun hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. **Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah**, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan dua puluh tahun dan memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD setiap lima tahun ;
2. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah**, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJPD dan memuat Visi, Misi, Gambaran Umum Kondisi Masa Kini, Gambaran Umum Kondisi yang diharapkan, Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Rencana Program Lima Tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Provinsi Jambi;
3. **Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)**, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran tekni RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah, yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap Bidang Kewenangan dan atau Fungsi



Pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi;

- 4. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)**, merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 ini , peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum (rujukan), antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal ;



15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air ;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6) ;
22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan



Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);

24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 1);

25. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Pada Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.3.1. Maksud

- a. Tersedianya dan tersusunnya dokumen perencanaan bidang lingkungan hidup.
- b. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008.

1.3.2. Tujuan

- a. Penyediaan suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah di bidang lingkungan hidup.
- b. Sebagai perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang lingkungan.



Secara umum bahwa RENSTRA Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Penyusunan, dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

3. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi Permasalahan, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra K/L dan, Telaahan KLHS dan RTRW serta Penentuan Isu-isu Strategis.

4. BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang visi, misi organisasi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan.

5. BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan tentang program dan kegiatan organisasi, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

6. BAB VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 tahun mendatang

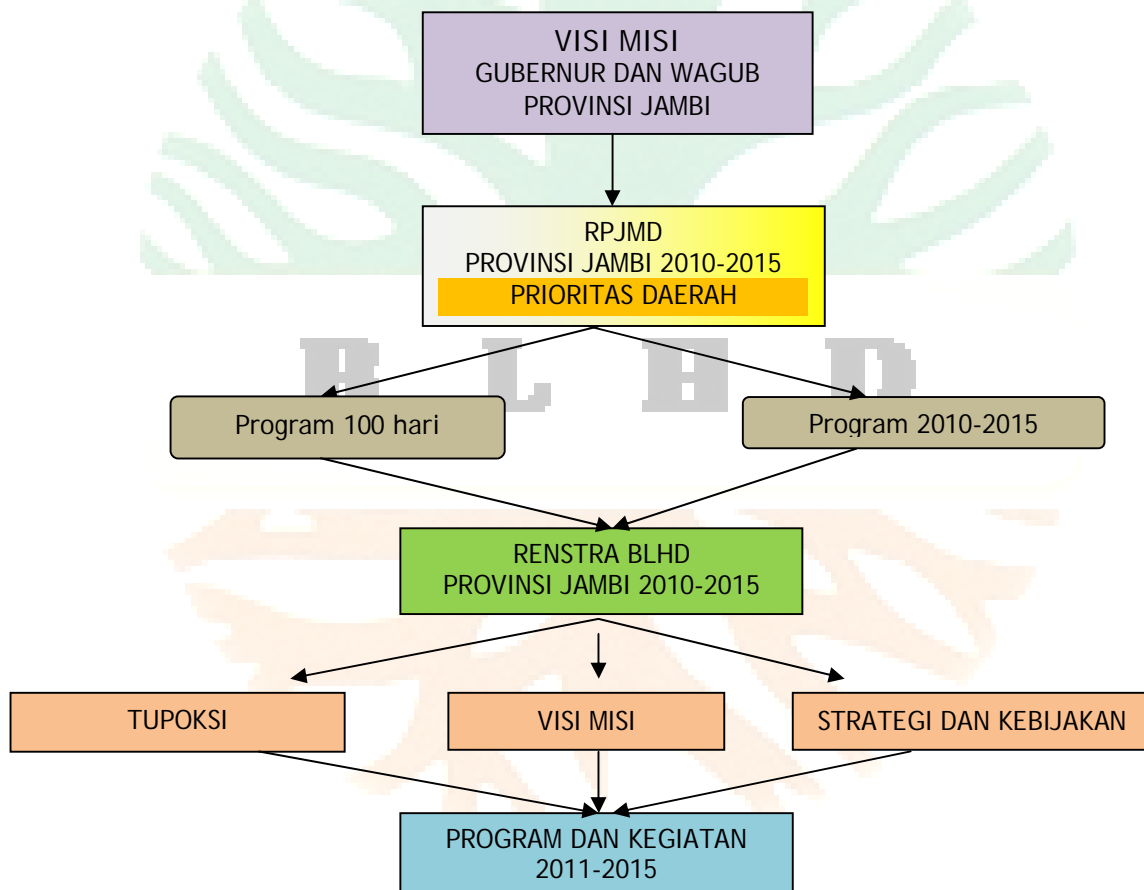


sebagaimana komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

7. BAB VIII. PENUTUP

Gambaran kerangka pikir penyusunan RENSTRA BLHD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 mengikuti Hierarki Sasaran Daerah yang fokus pada kinerja sebagaimana dalam skema pada gambar 1 :

Gambar 1 : Gambaran kerangka pikir penyusunan RENSTRA BLHD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 telah menetapkan prioritas daerah yang ingin dicapai pada Tahun 2010-2015 sebagai penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih. Prioritas Daerah dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 tersebut

dijabarkan dalam Program 100 Hari dan Program yang akan dilaksanakan pada kurun waktu tersebut.

Prioritas Daerah dalam RPJMD Tahun 2010-2015 selanjutnya menjadi acuan dalam penetapan sasaran kinerja Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015. Renstra dimaksud merupakan penjabaran Tupoksi, Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang akan dicapai untuk masa kerja 5 (lima) tahun mendatang.

